

**ANALISIS KESIAPAN GURU PAI DALAM MENYONGSONG KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR (STUDI KASUS DI MTSN 9 MADIUN)****Yeyen Afista<sup>1\*</sup>, Ali Priyono R<sup>2</sup>, Saihul Atho Alaul Huda<sup>3</sup>**<sup>1</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab HasbullahEmail: [yeynafista224@gmail.com](mailto:yeynafista224@gmail.com)<sup>2,3</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah  
Institusi/Universitas, dll.Email: [alipriyono@unwaha.ac.id](mailto:alipriyono@unwaha.ac.id)©2018 –JoEMS Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).**ABSTRACT**

*Responding to the competencies needed in the era of the industrial revolution 4.0 requires students and teachers to carry out effective, innovative and efficient learning activities. This study aims to analyze: (1) the readiness of Islamic Education teachers in facing the Indonesian Minister of Education and Culture's independent learning policy regarding USBN, UN, RPP, and PPDB Zoning; and (2) the condition of learning support facilities in welcoming the policy of free learning.*

*This research is a type of case study research using qualitative data in describing its characteristics, the process of change and analyzing its development regarding the readiness of Islamic Education teachers at MTsN 9 Madiun. Data collection techniques through participant observation, documentation, and in-depth interviews with informants including principals, teachers, and education personnel.*

*The results showed that: (1) the readiness of Islamic Education teachers in facing the independent learning policy has high readiness in the preparation of short lesson plans and has low readiness in implementing AKM and character surveys as a substitute for the National Examination in terms of cognitive, physical readiness and psychological aspects; (2) the condition of learning support facilities at MTsN 9 Madiun in welcoming the policy of free learning has exceeded the minimum standard of Permendikbud No. 24 of 2007 in quantity, and meets the criteria of good condition in quality. Laboratory learning facilities have not been able to prepare and support the learning process outside of class hours.*

**Keywords:** *Readiness, Freedom learning, Islamic Education***ABSTRAK**

Menyikapi kompetensi yang dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0 mengharuskan siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kesiapan guru PAI dalam menghadapi kebijakan merdeka belajar Mendikbud RI tentang USBN, UN, RPP, dan PPDB Zonasi; dan (2) kondisi sarana penunjang pembelajaran dalam menyongsong kebijakan merdeka belajar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan data kualitatif dalam mendeskripsikan karakteristiknya, proses perubahan dan menganalisis perkembangannya mengenai kesiapan guru PAI di MTsN 9 Madiun. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada informan yang meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesiapan guru PAI dalam menghadapi kebijakan merdeka belajar memiliki kesiapan yang tinggi dalam penyusunan RPP ringkas dan memiliki kesiapan yang rendah dalam pelaksanaan AKM dan survei karakter sebagai pengganti UN ditinjau dari aspek kognitif, kesiapan fisik, dan kesiapan psikologis; (2) kondisi sarana penunjang pembelajaran di MTsN 9 Madiun dalam menyongsong kebijakan merdeka belajar telah melampaui standar minimum Permendikbud No. 24 Tahun 2007 secara kuantitas, dan memenuhi kriteria kondisi yang baik secara kualitas. Sarana pembelajaran laboratorium belum dapat menyiapkan dan menunjang proses pembelajaran diluar jam pelajaran.

**Kata Kunci:** Kesiapan, Merdeka Belajar, Pendidikan Agama Islam

---

## **PENDAHULUAN**

Perubahan kebijakan sistem pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan demi perbaikan kualitas sumber daya manusia pada suatu bangsa. Kurikulum dengan segala perubahannya tentu saja tidak dapat terlepas dari dunia pendidikan. Pendidikan yang baik akan menciptakan pola pikir, sikap dan karakter yang baik pula bagi manusianya (Dakir, 2010). Apabila mutu lulusan baik, dapat diprediksi bahwa mutu kegiatan belajar mengajar, input siswa, kompetensi pendidik, sarana prasarana, pengelolaan dana, manajemen dan lingkungan sudah memadai. Peran kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar, input siswa, kompetensi pendidik tersebut adalah sebagai pemberi arah untuk tercapainya tujuan pendidikan tertentu (Wahyudin, 2014).

Sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tercatat telah 11 kali Indonesia mengalami perubahan Kurikulum Pendidikan (Widyastono, 2015), yaitu 8 kali sebelum era otonomi daerah, dan 3 kali pada masa otonomi daerah hingga sekarang. Sebelum otonomi daerah tahun 1999, Indonesia telah mengalami 8 kali perubahan kurikulum yaitu: (1) Kurikulum 1947; (2) Kurikulum 1964; (3) Kurikulum 1968; (4) Kurikulum 1973 (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan); (5) Kurikulum 1975; (6) Kurikulum 1984; (7) Kurikulum 1994; (8) Kurikulum 1999 (Kurikulum 1994 yang disempurnakan). Sementara itu pada masa otonomi daerah saat ini, Indonesia mengalami 3 kali perubahan kurikulum, yaitu: (1) Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK); (2) Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/ KTSP); dan (3) Kurikulum 2013.

Pemberlakuan sebuah kurikulum dalam pendidikan menengah pada dasarnya adalah suatu pembaharuan pada sistem pendidikannya. Adanya suatu pembaharuan pada sistem perubahan didasari atas perubahan tuntutan pada aspek kehidupan. Tuntutan hidup dapat berubah karena adanya perubahan pada sosial budaya masyarakat yaitu perubahan pola hidup dan perubahan sosial politik (Sanjaya, 2011). Perubahan pola hidup terjadi karena adanya perubahan pada dalam tatanan masyarakat dari yang bersifat agraris tradisional menjadi era industri modern saat ini. Menyikapi kompetensi yang dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0 mengharuskan siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan efisien (Suwardana, 2018).

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, Mendikbud pada tahun 2020 akan menerapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Dengan sistem itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam memberikan penilaian hasil belajar siswa.

Selain itu, Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Sedangkan untuk penyusunan RPP, Kemendikbud menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Upaya dalam menghadapi perubahan sistem pendidikan dan kurikulum, sekolah MTsN Kare membutuhkan adaptasi dan penyesuaian terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penyusunan instrumen, dan kesiapan sarana prasarana dalam menunjang merdeka belajar (Sugiri & Sigit, 2020). Berdasarkan analisis kebutuhan (survei) yang dilakukan, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terdiri mata pelajaran Fiqih, Al Quran Hadits, Akidah Akhlaq, dan Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN Kare mayoritas menggunakan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah dan menggunakan media maket jika diperlukan.

Pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional memang secara empiris memberikan kemerdekaan guru dalam memberikan penilaian kepada siswa. Namun hal ini perlu diimbangi dengan pelaksanaan pembelajaran yang tetap mengutamakan kualitas hasil belajar siswa. Fakta di lapangan juga ditemukan bahwa guru dalam melaksanakan asesmen kompetensi yaitu dengan metode pemberian butir soal yang low order thinking yaitu meliputi taksonomi pengetahuan dan pemahaman. Butir asesmen belum menunjukkan butir soal tipe high order thinking. Sedangkan dalam melaksanakan asesmen survei karakter yang dibebankan kepada guru PKN dan Guru PAI, dalam hal ini mereka belum mampu menunjukkan instrumen yang valid dan reliabel. Karena anggapan bahwa pelaksanaan penilaian karakter dapat dinilai tanpa melalui instrumen pengamatan. Permasalahan lain yang ditemukan pada saat survei lokasi penelitian yaitu aktivitas guru PAI yang disibukkan dalam menyusun perangkat pembelajaran yang harus digunakan dalam setiap pertemuan. Perangkat pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP dalam satu semester bisa mencapai ratusan halaman. Sehingga hal ini tentu mempengaruhi aktivitas mengajar guru.

Setiap adanya kebijakan yang bersifat positif, suatu instansi pasti berupaya mempersiapkan segala kebutuhan dalam menunjang kebijakan tersebut. Sebagaimana yang terjadi di MTsN Kare dalam mempersiapkan merdeka belajar. Seluruh guru pada umumnya harus mempersiapkan sumber belajar dan media belajar yang mampu menunjang kegiatan belajar yang merdeka. Khususnya bagi guru PAI yang memiliki kewajiban dalam penguatan pendidikan karakter, merdeka belajar tidak akan dapat berjalan tanpa persiapan yang matang. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis kesiapan guru PAI di MTsN Kare dalam menyongsong kebijakan merdeka belajar yang ditinjau dari proses pembelajaran, pelaksanaan asesmen, respon guru, dan kesiapan sarana belajar mengajar. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini meliputi: (1) menganalisis kesiapan guru PAI dalam menghadapi kebijakan merdeka belajar Mendikbud RI tentang USBN, UN, RPP, dan PPDB Zonasi; dan (2) menganalisis kondisi sarana prasarana penunjang pembelajaran dalam menyongsong kebijakan merdeka belajar.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi

kasus dengan menggunakan data kualitatif dalam mendeskripsikan karakteristiknya, proses perubahan dan menganalisis perkembangannya mengenai kesiapan guru PAI di MTsN 9 Madiun. Dengan berpedoman empat kebijakan merdeka belajar, studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap kesiapan guru berdasarkan indikatornya dengan menyelidiki keadaan, kondisi atau faktor lain yang mempengaruhi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi kasus penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

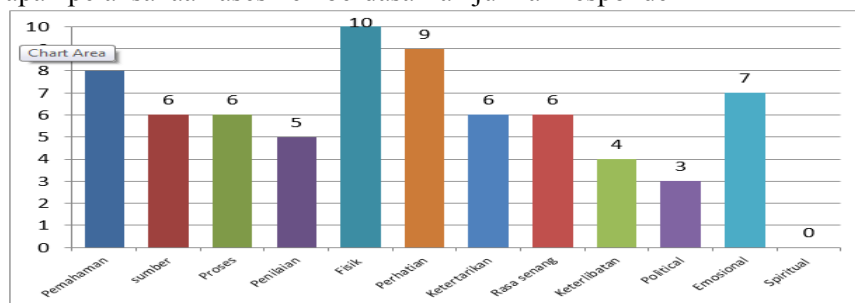
#### **Kesiapan Pelaksanaan Asesmen pengganti USBN**

Berdasarkan landasan teori dan temuan di lokasi penelitian, kesiapan guru dalam pelaksanaan asesmen pengganti USBN adalah suatu kondisi yang membuat seorang guru bersedia untuk melaksanakan asesmen pengganti USBN ditinjau dari aspek kognitif (melalui pemahamannya, penggunaan sumber belajar, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran) untuk mencapai tujuan peningkatan sistem pembelajaran berdasarkan kesiapan fisik (tenaga dan kesehatan yang cukup), kesiapan psikologis (minat dan motivasi), dan kesiapan materiil (adanya sarana prasarana yang mendukung). Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam kepada 10 responden, diperoleh kesiapan berdasarkan aspek kognitif: (1) tingkat pemahamannya, 80% guru memahami jenis asesmen yang digunakan sebagai pengganti USBN. Hal ini diketahui dari jawaban responden yang diajukan oleh peneliti; (2) penggunaan sumber belajar, guru telah menyediakan sumber belajar melalui buku yang terdapat di perpustakaan dan dari internet dengan pengawasan guru; (3) proses pembelajaran, 60% guru menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada siswa walaupun masih dalam rencana pembelajaran dalam mendukung penulisan karya ilmiah; dan (4) penilaian pembelajaran, guru telah memiliki instrumen dalam menilai hasil karya tulis ilmiah siswa yang dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan kesiapan fisiknya, 100% guru menyatakan tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan asesmen tersebut. Guru memiliki riwayat kesehatan yang baik berdasarkan hasil dokumentasi, sehingga tidak mengganggu kinerja guru dalam mempersiapkan asesmen karya tulis ilmiah kepada siswa.

Berdasarkan kesiapan psikologisnya, 80% guru memiliki minat dan termotivasi dalam melaksanakan dan menyusun asesemen tersebut. Hal ini nampak dari aspek minat yaitu: (1) guru memiliki perhatian terhadap adanya kebijakan penerapan asesmen pengganti USBN dengan melaksanakan diskusi antar guru dan rapat terbatas dalam penyusunan instrumennya; (2) adanya ketertarikan guru dalam membimbing siswa dalam rangka persiapan asesmen karya tulis ilmiah; (3) rasa senang yang diungkapkan guru mempersiapkan hingga menyusun instrumen

karena mereka dapat melaksanakan penilaian terhadap siswanya sendiri secara merdeka; dan (4) keterlibatan guru dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah dari pembimbingan pengambilan data di lapangan, hingga teknik penulisannya. Aspek motivasi yang ditunjukkan yaitu pada tahap emosional dimana guru memiliki tujuan yang jelas untuk menilai karya tulis yang dihasilkan siswa. Sarana prasarana yang mendukung dalam rencana pelaksanaan asesmen karya tulis ilmiah yaitu ketersediaan perpustakaan, sumber belajar mandiri, dan laboratorium.

**Grafik 4.1** Kesiapan pelaksanaan asesmen berdasarkan jumlah responden



### **Kesiapan Rencana AKM dan Survei Karakter pengganti UN**

Berdasarkan landasan teori dan temuan di lokasi penelitian, kesiapan guru dalam pelaksanaan AKM dan survei karakter adalah suatu kondisi yang membuat seorang guru bersedia untuk melaksanakan AKM dan survei karakter ditinjau dari aspek kognitif (melalui pemahamannya, penggunaan sumber belajar, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran) untuk mencapai tujuan peningkatan sistem pembelajaran berdasarkan kesiapan fisik (tenaga dan kesehatan yang cukup), kesiapan psikologis (minat dan motivasi), dan kesiapan materiil (adanya sarana prasarana yang mendukung). Berdasarkan hasil observasi partisipasi dan wawancara mendalam kepada 10 responden, diperoleh kesiapan berdasarkan aspek kognitif: (1) tingkat pemahamannya, 60% guru memahami jenis asesmen yang digunakan sebagai AKM dan indikator yang digunakan dalam survei karakter. Hal ini diketahui dari jawaban responden yang diajukan oleh peneliti; (2) penggunaan sumber belajar, guru telah menyediakan sumber belajar melalui buku yang terdapat di perpustakaan dan dari internet dengan pengawasan guru; (3) proses pembelajaran, 60% guru menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada siswa walaupun masih dalam rencana pembelajaran dalam mendukung penulisan karya ilmiah; dan (4) penilaian pembelajaran, guru belum memiliki

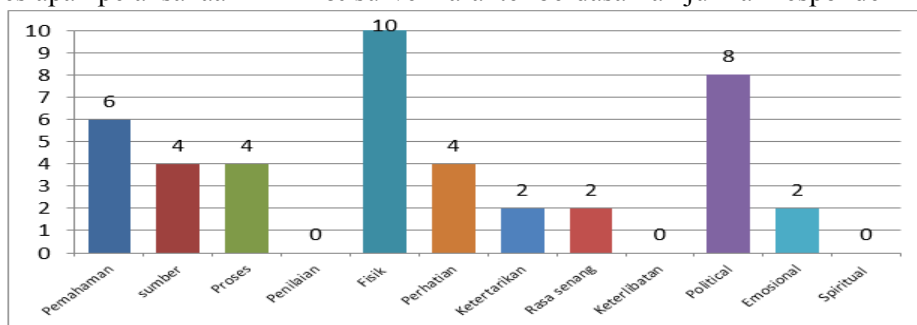
instrumen dalam menilai AKM baik dalam mengukur kemampuan literasi, kemampuan numerik dan survei karakter. Berdasarkan kesiapan fisiknya, 100% guru menyatakan tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan asesmen tersebut. Guru memiliki riwayat kesehatan yang baik berdasarkan hasil dokumentasi, sehingga tidak mengganggu kinerja guru dalam mempersiapkan AKM dan survei karakter kepada siswa.

Berdasarkan kesiapan psikologisnya, hanya 40% guru yang memiliki minat dan termotivasi dalam melaksanakan dan menyusun asesemen tersebut. Hal ini nampak dari aspek minat yaitu: (1) guru memiliki perhatian terhadap adanya kebijakan pelaksanaan AKM dan survei karakter dengan melaksanakan diskusi antar guru dan rapat terbatas dalam merencanakan dan menumbuhkan kemampuan literasi dan numerik siswa; (2) belum terlihat adanya ketertarikan guru dalam mempersiapkan AKM dan survei karakter karena faktor pemahaman guru terhadap pelaksanaan asesmen tersebut; (3) belum nampak adanya rasa senang yang diungkapkan guru dalam mempersiapkan AKM dan survei karakter karena faktor pemahaman guru terhadap pelaksanaan asesmen tersebut; dan (4) belum terdapat keterlibatan guru dalam proses penyusunan instrumen AKM dan survei karakter karena belum adanya rencana penyusunan instrumen dalam menilai kemampuan literasi, numerik dan survei

karakter siswa. Aspek motivasi yang ditunjukkan yaitu pada tahap political dimana guru belum memiliki tujuan yang jelas dalam melaksanakan AKM dan survei karakter, guru masih merasa lebih mempercayakan UN sebagai tolok ukur kemampuan siswa, karena saat ini UN juga bukan satu-satunya penentu kelulusan. Namun kembali

kepada kebijakan pemerintah dimana guru memang mau tidak mau harus melaksanakan AKM dan Survei karakter tahun depan. Sarana prasarana yang mendukung dalam rencana pelaksanaan AKM dan survei karakter yaitu ketersediaan perpustakaan, sumber belajar mandiri, dan laboratorium.

**Grafik 4.2** Kesiapan pelaksanaan AKM & survei karakter berdasarkan jumlah responden

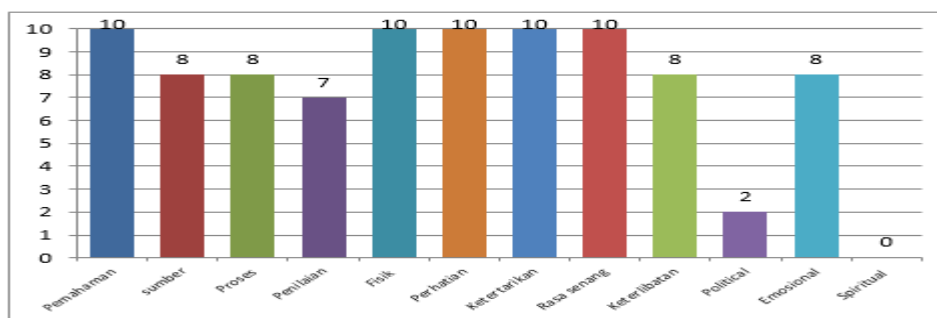


### **Kesiapan Penyusunan Format RPP Ringkas**

Berdasarkan landasan teori dan temuan di lokasi penelitian, kesiapan guru dalam penyusunan RPP versi Merdeka Belajar adalah suatu kondisi yang membuat seorang guru bersedia untuk membuat format RPP versi Merdeka Belajar ditinjau dari aspek kognitif (melalui pemahamannya, penggunaan sumber informasi, proses penyusunan, dan penilaian RPP) untuk mencapai tujuan peningkatan sistem pembelajaran berdasarkan kesiapan fisik (tenaga dan kesehatan yang cukup), kesiapan psikologis (minat dan motivasi), dan kesiapan materiil (adanya sarana prasarana yang mendukung). Berdasarkan hasil observasi partisipasi dan wawancara mendalam kepada 10 responden, diperoleh kesiapan berdasarkan aspek kognitif: (1) tingkat pemahamannya, 100% guru memahami format RPP yang digunakan. Hal ini diketahui dari jawaban responden yang diajukan oleh peneliti; (2) penggunaan sumber informasi, guru telah turut aktif dalam mengikuti diklat penyusunan RPP; (3) proses penyusunan, 60% guru menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada siswa walaupun masih dalam rencana pembelajaran yang termuat dalam RPP versi sebelumnya; dan (4) penilaian RPP, guru telah memiliki instrumen dalam menilai RPP yang disusun oleh guru berdasarkan format RPP versi sebelumnya. Berdasarkan kesiapan fisiknya, 100%

guru menyatakan tidak terdapat masalah dalam penyusunan RPP tersebut. Guru memiliki riwayat kesehatan yang baik berdasarkan hasil dokumentasi, sehingga tidak mengganggu kinerja guru dalam menyusun RPP versi Merdeka Belajar. Berdasarkan kesiapan psikologisnya, 100% guru memiliki minat dan termotivasi dalam melaksanakan dan menyusun RPP ringkas. Hal ini nampak dari aspek minat yaitu: (1) guru memiliki perhatian yang tinggi terhadap adanya kebijakan penyusunan RPP ringkas dan mulai memangkas maupun menyusun ulang format RPP; (2) adanya ketertarikan guru menyusun RPP ini dikarenakan format yang ringkas; (3) rasa senang kembali diungkapkan oleh semua guru dalam penyusunan RPP. Guru menjadi lebih fokus pada pelaksanaan pembelajaran di kelas serta berinovasi dalam penyusunannya baik di isi RPP maupun di lampiran; dan (4) guru terlibat penuh dalam proses penyusunan RPP ringkas sebagaimana agenda rutin guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan administrasi pendidikan. Aspek motivasi yang ditunjukkan yaitu pada tahap emosional dimana guru memiliki tujuan yang jelas dalam menyusun RPP ringkas. Sarana prasarana yang mendukung dalam penyusunan RPP ringkas yaitu fasilitas diklat yang dapat diikuti oleh masing-masing guru untuk memperdalam penguasaan penyusunan RPP.

**Grafik 4.3** Kesiapan pelaksanaan RPP ringkas berdasarkan jumlah responden



### **Kesiapan Pelaksanaan PPDB Zonasi**

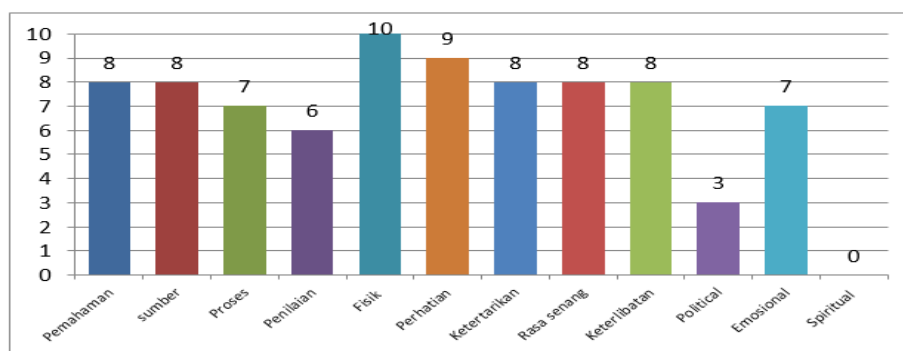
Berdasarkan landasan teori dan temuan di lokasi penelitian, kesiapan guru dalam pelaksanaan PPDB zonasi adalah suatu kondisi yang membuat seorang guru bersedia untuk melaksanakan PPDB zonasi ditinjau dari aspek kognitif (melalui pemahamannya, penggunaan sumber informasi, proses, dan penilaian PPDB) untuk mencapai tujuan peningkatan sistem pembelajaran berdasarkan kesiapan fisik (tenaga dan kesehatan yang cukup), kesiapan psikologis (minat dan motivasi), dan kesiapan materiil (adanya sarana prasarana yang mendukung). Berdasarkan hasil observasi partisipasi dan wawancara mendalam kepada 10 responden (guru dan tenaga kependidikan), diperoleh kesiapan berdasarkan aspek kognitif: (1) tingkat pemahamannya, 80% guru dan tenaga kependidikan memahami pelaksanaan PPDB zonasi versi Merdeka Belajar. Hal ini diketahui dari jawaban responden yang diajukan oleh peneliti; (2) penggunaan sumber informasi, guru dan tenaga kependidikan telah mempelajari dan membandingkan kebijakan PPDB zonasi baru dengan sistem PPDB lama sesuai edaran Kemendikbud; (3) proses PPDB zonasi versi Merdeka Belajar memang belum dilaksanakan tahun akademik 2020/2021, namun sistem PPDB saat ini juga dapat dikatakan sebagai sistem PPDB yang baru karena hanya memiliki perbedaan secara proporsi penerimaannya; dan (4) untuk penilaian PPDB, guru dan tenaga kependidikan belum dapat melakukan evaluasi karena belum adanya kesepakatan yang formal diantara seluruh sivitas akademik di MTsN 9 Madiun. Berdasarkan kesiapan fisiknya, 100% guru dan tenaga kependidikan menyatakan tidak

terdapat masalah dalam rencana pelaksanaan PPDB tersebut. Guru dan tenaga kependidikan memiliki riwayat kesehatan yang baik berdasarkan hasil dokumentasi, sehingga tidak mengganggu kinerja guru dalam rencana pelaksanaan PPDB versi Merdeka Belajar.

Berdasarkan kesiapan psikologisnya, 90% guru dan tenaga kependidikan memiliki minat dan termotivasi dalam melaksanakan PPDB zonasi meski dalam pelaksanaannya tidak berbeda dengan PPDB tahun kemarin. Hal ini nampak dari aspek minat yaitu: (1) guru dan tenaga kependidikan memiliki perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan PPDB; (2) ketertarikan guru dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan PPDB terlihat dalam batas normal sebagaimana pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya; (3) rasa senang terungkap oleh guru dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan PPDB berdasarkan keterangan dan brosur yang dibagikan kepada calon peserta didik; dan (4) guru dan tenaga kependidikan terlibat penuh dalam pelaksanaan PPDB. Tenaga kependidikan menginput dana murid baru, dan guru turut membagikan formulir secara online kepada calon peserta didik melalui tautan di media sosial. Aspek motivasi yang ditunjukkan yaitu pada tahap emosional dimana guru dan tenaga kependidikan memiliki tujuan yang jelas dalam pelaksanaan PPDB yakni menambah jumlah peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas Madrasah. Sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan PPDB zonasi yaitu adanya sistem penerimaan berbasis online dan ketersediaan bahan alat tulis kantor.

**Grafik 4.4** Kesiapan pelaksanaan PPDB zonasi berdasarkan jumlah responden





### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, kesiapan guru dalam menyongsong kebijakan merdeka belajar yang meliputi asesmen berupa karya tulis ilmiah pengganti USBN, AKM dan survei karakter sebagai pengganti UN, format RPP ringkas, dan pelaksanaan PPDB zonasi ditinjau dari aspek kognitif (melalui pemahamannya, penggunaan sumber informasi, proses, dan penilaian) menunjukkan tingkat kesiapan yang cukup. Hal ini dapat dilihat berdasarkan responden yang menyatakan pemahamannya, sumber informasi yang digunakan, proses perencanaan maupun pelaksanaannya, dan penilaiannya terkait 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Tingkat kesiapan berdasarkan aspek kognitif paling tinggi yaitu pada RPP ringkas yang dinilai memudahkan guru dalam penyusunannya. Tingkat kesiapan berdasarkan aspek kognitif paling rendah terdapat pada AKM dan survei karakter sebagai pengganti UN yang dinilai perlu adanya instrumen yang valid dan reliabel minimal dalam tingkat wilayah/daerah.

Berdasarkan tingkat kesiapan fisik, keseluruhan responden/guru menyatakan siap dalam melaksanakan keempat pokok kebijakan Merdeka Belajar. Sedangkan untuk tingkat kesiapan psikologis, tingkat kesiapan psikologis paling tinggi yaitu pada RPP ringkas yang dinilai mampu menumbuhkan minat dan motivasi guru dalam penyusunannya. Tingkat kesiapan psikologis paling rendah terdapat pada AKM dan survei karakter yang dinilai guru kurang berminat dan termotivasi dalam penyusunan asesmen tersebut.

Kondisi sarana prasarana penunjang pembelajaran dalam menyongsong kebijakan Merdeka Belajar di MTsN 9 Madiun dapat dikategorikan cukup siap dan memadai. Sarana dan prasarana di madrasah tersebut telah melampaui kriteria standar pengadaan sarana pembelajaran berdasarkan Permendikbud No. 24 Tahun 2007 dan memenuhi perbandingan rasio jumlah siswa dengan ketersediaan sarana pendukung pembelajaran.

Perpustakaan sebagai sarana penunjang literasi telah menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Kondisi sarana pembelajaran juga menunjukkan kondisi yang baik. Namun untuk laboratorium pihak madrasah belum dapat menyediakan akses secara penuh diluar jam mata pelajaran.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) kesiapan guru PAI dalam menghadapi kebijakan merdeka belajar Mendikbud RI tentang USBN, UN, RPP, dan PPDB Zonasi yaitu guru di MTsN 9 Madiun memiliki kesiapan yang tinggi dalam penyusunan RPP singkat dan memiliki kesiapan yang rendah dalam pelaksanaan AKM dan survei karakter sebagai pengganti UN ditinjau dari aspek kognitif, kesiapan fisik, dan kesiapan psikologis; dan (2) kondisi sarana prasarana penunjang pembelajaran di MTsN 9 Madiun dalam menyongsong kebijakan merdeka belajar antara lain: (1) ruang kelas; (2) perpustakaan; (3) lab. IPA; dan (4) lab. Komputer telah melampaui standar minimum Permendikbud No. 24 Tahun 2007 secara kuantitas, dan memenuhi kriteria kondisi yang baik secara kualitas. Sarana pembelajaran laboratorium belum dapat menyiapkan dan menunjang proses pembelajaran diluar jam pelajaran.

Saran dalam penelitian diuraikan sebagai berikut: (1) penelitian ini membahas terkait kesiapan guru dalam menghadapi sebuah kebijakan baru dari pemerintah. Sehingga diharapkan penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis hal teknis terkait instrumen dan kurikulum yang akan digunakan dalam Merdeka Belajar; (2) sumber belajar yang merupakan salah satu sarana pembelajaran perlu ditingkatkan produktifitasnya dari pihak guru; (3) penelitian ini dilaksanakan ditengah bencana nasional Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, kegiatan administrasi, bahkan rencana pelaksanaan 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar sehingga perlu dilaksanakan penelitian dalam situasi yang kondusif dan lebih banyak menggunakan data primer.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Dakir. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanjaya, Ades. (2011). *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiri, W. A., & Sigit, P. 2020. Perspektif Asesmen Autentik Sebagai Alat Evaluasi dalam Merdeka Belajar. *At-Thullab*. 4(1): 54-61
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suwardana, Hendra. (2018). Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*. 1(2), 109-118.
- Wahyudin. (2014). *Managemen Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Widyastono, Herry. (2015). *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah dari Kurikulum 2004, 2006 ke Kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara.